

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Abstrak.....	iii-ix
Pendidikan Keperawatan:	
Upaya Menghasilkan Tenaga Perawat Berkualitas oleh: Tri Rini Puji Lestari.....	1-10
Pemberlakuan Upah Minimum dalam Sistem Pengupahan Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja oleh: Arrista Trimaya.....	11-20
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengelolaan Sampah Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 oleh: Sri Nurhayati Qodriyatun.....	21-33
Mengatasi Perilaku Kontraproduktif Aparatur Negara melalui Sistem Remunerasi (Sebuah <i>Review</i> Mengenai Keadilan Organisasi) oleh: Sulis Winurini	35-49
Pendidikan Madrasah di Indonesia oleh: Faridah Alawiyah.....	51-58
Menuju ASEAN Bebas Narkoba 2015: Situasi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia oleh: A. M. Kartaatmaja	59-69
Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang) oleh: Anih Sri Suryani	71-84
<i>Book Review</i>	
Mengkaji Konflik Suriah oleh: A. Muchaddam Fahham.....	85-92
Tentang Penulis Pedoman Penulisan	

ASPIRASI
Jurnal Studi Masalah-Masalah Sosial

Vol. 5 No. 1 Juni 2014

ISSN: 286-6305

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

Tri Rini Puji Lestari

*Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI*

Pendidikan Keperawatan: Upaya Menghasilkan Tenaga Perawat Berkualitas

Jurnal ASPIRASI Vol. 5 No. 1 Juni 2014
halaman 1-10

ABSTRACT

Arrangements regarding the establishment and organization of nursing education are still not decisive and visible. As a result, general recognition of nursing as a profession and the number of nurses that dominates the health workforce have not been optimal. This paper uses descriptive qualitative analysis method as an approach to the study of literature. The purpose of this study is to determine the current condition of and the future hope for nursing education system, as to create quality nurses. Based on the results of the study, in order to create quality nurses there is a need for quality nursing education. It is because nursing education is an important process that every nurse must undertake. This is an effort for quality assurance of nursing education which required necessary standards of research and development of nursing education.

Keywords: *Nursing education, nursing, quality.*

ABSTRAK

Pengaturan mengenai pendirian dan penyelenggaraan pendidikan keperawatan masih belum tegas dan jelas. Akibatnya pengakuan keperawatan sebagai sebuah profesi dan jumlah perawat yang mendominasi tenaga kesehatan belum optimal. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Tujuan penulisan untuk mengetahui kondisi sistem pendidikan keperawatan selama ini dan harapan kedepannya, sehingga dapat menghasilkan tenaga perawat yang berkualitas. Berdasarkan hasil kajian, untuk menghasilkan tenaga perawat yang berkualitas diperlukan pendidikan keperawatan yang berkualitas pula. Sebab Pendidikan keperawatan merupakan satu proses penting yang harus dilalui oleh setiap perawat. Ini merupakan suatu upaya penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan keperawatan dimana diperlukan sebuah standar penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan penelitian keperawatan.

Kata Kunci: Pendidikan keperawatan, perawat, kualitas.

ASPIRASI
Jurnal Studi Masalah-Masalah Sosial

Vol. 5 No. 1 Juni 2014

ISSN: 286-6305

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

Arrista Trimaya

*Bidang Kesejahteraan Rakyat Deputy Perundang-undangan
Sekretariat Jenderal DPR RI*

**Pemberlakuan Upah Minimum dalam Sistem Pengupahan Nasional
untuk Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja**

**Jurnal ASPIRASI Vol. 5 No. 1 Juni 2014
halaman 11-20**

ABSTRACT

The key issue of employment relations is wages, a monetary compensation provided by employer to employee in an employment relation stipulated in an employment agreement. Basically, payment of wages from employer to employee has to consider the three aspects of technical, economical, and legal. These three aspects are interrelated with each other and in its implementation, none can be removed. This study used literature study method. As an approach this method is intended to gathered materials, data, and all information related to wages. The results of this literature study concluded that there is a significant importance of an imposed wage system at national level. Wage determination system is necessary in order to assure employee's paid wage is above the minimum subsistence wage. Wage regulation through national wage system is also aim at improving the welfare of work force, increasing productivity, and seeking equitable distribution of income in order to create social welfare.

Keywords: *Wages, welfare, work force.*

ABSTRAK

Intisari dari hubungan kerja adalah upah, yaitu imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada tenaga kerja dalam suatu hubungan kerja yang tertuang dalam suatu perjanjian kerja. Pemberian upah dari suatu pemberi kerja kepada tenaga kerja pada dasarnya harus memperhatikan tiga aspek, yaitu aspek teknis, ekonomis, dan hukum. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan satu sama lain dan dalam pelaksanaan pemberian upah salah satu aspek tidak dapat dihilangkan. Metode penulisan yang digunakan adalah studi kepustakaan. Kegiatan studi kepustakaan dimaksudkan sebagai salah satu pendekatan dalam pengumpulan bahan, data, dan materi yang memuat informasi berkaitan dengan sistem pengupahan. Dari hasil studi kepustakaan tersebut diperoleh simpulan mengenai pentingnya diberlakukan suatu sistem pengupahan nasional. Sistem diperlukan agar penetapan upah berada di atas kebutuhan hidup minimum tenaga kerja. Pemberlakuan upah minimum melalui sistem pengupahan nasional juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengupayakan pemerataan pendapatan dalam rangka menciptakan keadilan sosial.

Kata kunci: Upah, kesejahteraan, tenaga kerja.

ASPIRASI
Jurnal Studi Masalah-Masalah Sosial

Vol. 5 No. 1 Juni 2014

ISSN: 286-6305

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

Sri Nurhayati Qodriyatun

*Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI*

**Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui
Pengelolaan Sampah Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008**

**Jurnal ASPIRASI Vol. 5 No. 1 Juni 2014
halaman 21-33**

ABSTRACT

People have always produced waste and it is become a problem if not managed properly. The Act No. 18 of 2008 on Waste Management has shift the paradigm of waste management to a resource that has economic value useful for human life as to improve the welfare of society. This research used a qualitative approach with descriptive method, which aims at describing waste management based on the Act No. 18 of 2008 so as to improve the welfare of society. The results showed that waste management as mandated by the Act No. 18 of 2008, has brought many benefits for the improvement of the well-being of the community in the city of Malang. With a strong commitment, local government found innovative ways in utilizing waste in the city.

Keywords: *Welfare of community, waste management, The Act No. 18 of 2008, The city of Malang.*

ABSTRAK

Dalam setiap kehidupan manusia selalu menghasilkan sampah dan sampah menjadi masalah ketika tidak dikelola dengan baik. UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengubah paradigma sampah menjadi suatu sumber daya yang memiliki nilai ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan pengelolaan sampah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah seperti yang diamanatkan UU No. 18 Tahun 2008, telah memberikan banyak manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Malang. Dengan komitmen pemerintah daerah yang kuat muncul berbagai inovasi dalam pemanfaatan sampah di kota tersebut.

Kata kunci: Kesejahteraan masyarakat, pengelolaan sampah, UU No. 18 Tahun 2008, Kota Malang.

ASPIRASI
Jurnal Studi Masalah-Masalah Sosial

Vol. 5 No. 1 Juni 2014

ISSN: 286-6305

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

Sulis Winurini

*Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI*

**Mengatasi Perilaku Kontraproduktif Aparatur Negara melalui Sistem Remunerasi
(Sebuah Review Mengenai Keadilan Organisasi)**

**Jurnal ASPIRASI Vol. 5 No. 1 Juni 2014
halaman 35-49**

ABSTRACT

The purpose of this study is to evaluate the implementation of remuneration system in bureaucracy reform, with reference to organizational justice theory. Research methodology used was literature review. The study concluded that there was a real effort by the government to implement fairness principle in remuneration package, as part of bureaucracy reform. The implementation of fairness principles is captured in consideration of employees' contribution to determine the performance benefit value. However, further restructuring process of remuneration system is still needed. Contribution is still emphasizing on discipline rather than work performance to determine the performance benefit values. Furthermore, there was also a problem of budget allocation for remuneration package. Ideal benefit payment for employees is still difficult to reach within this decade. Harmonization between strategy and employees' response needs to be continuously diagnosed due to different characteristic of bureaucracy in various governmental bodies. The implementation of fairness principles in remuneration system is just one of the strategies to fight against counterproductive behavior. Support on other strategies is still needed in order to reach optimum condition of the remuneration system, as expected.

Keywords: *Remuneration, counter-productive work behaviour, organizational justice.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem remunerasi di dalam reformasi birokrasi, yaitu dengan mengacu pada teori keadilan organisasi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disimpulkan, ada upaya nyata dari pemerintah untuk menerapkan prinsip keadilan di dalam penerapan remunerasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Penerapan prinsip keadilan ini tergambar dari adanya pertimbangan kontribusi pegawai di dalam penentuan tunjangan kinerja. Meskipun demikian, pembenahan selanjutnya untuk sistem remunerasi masih perlu dilakukan. Kontribusi dalam penentuan besaran tunjangan kinerja masih ditekankan pada disiplin, dibanding pencapaian prestasi itu sendiri. Selain itu, anggaran untuk pelaksanaan remunerasi itu sendiri masih menjadi kendala. Untuk membayar remunerasi pegawai, hingga mencapai kondisi ideal ternyata masih sulit dilakukan dalam satu dekade ini. Kesesuaian antara strategi dengan respon pegawai perlu didiagnosa secara terus-menerus, karena karakteristik birokrasi dalam suatu pemerintahan berbeda satu sama lain. Penerapan prinsip keadilan dalam sistem remunerasi hanya merupakan bagian dari strategi untuk mengatasi perilaku kontraproduktif. Dukungan strategi lain tetap diperlukan, supaya remunerasi bisa berjalan secara optimal, sesuai dengan yang diharapkan.

Kata kunci: Remunerasi, perilaku kontraproduktif, keadilan organisasi.

ASPIRASI
Jurnal Studi Masalah-Masalah Sosial

Vol. 5 No. 1 Juni 2014

ISSN: 286-6305

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

Faridah Alawiyah

*Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI*

Pendidikan Madrasah di Indonesia

**Jurnal ASPIRASI Vol. 5 No. 1 Juni 2014
halaman 51-58**

ABSTRACT

Madrasah (Islamic school) has a strategic role in the development of the nation. Currently, madrasah is still considered as delivering second class education in Indonesia. This happens because madrasah has several major problems such as management problems and poor quality of education. This paper is intended to provide an overview on Islamic school's education system, its problems, opportunities, and challenges. Madrasah has become a part of the national education system. Literature study was used as the method in this study by collecting secondary data from various sources and went through descriptive data analysis in detail. Various problems faced by madrasah were education management, gap between public and private madrasah, quality of madrasah, as well as curriculum to name but a few. On the other hand, madrasah also had its own strength with society's better understanding to Islamic education that would turn that strength into opportunity and challenge for advancement of madrasah.

Keywords: *Islamic school, education, role of madrasah, national education system.*

ABSTRAK

Madrasah memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa. Saat ini pendidikan madrasah masih dianggap pendidikan "kelas dua". Hal ini terjadi karena penyelenggaraan madrasah masih menghadapi sejumlah masalah besar mulai seperti persoalan pengelolaan dan rendahnya mutu pendidikan madrasah. Tulisan ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang kiprah madrasah dalam sistem pendidikan di Indonesia, permasalahan madrasah, peluang, dan tantangan madrasah. Madrasah telah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yang kemudian melakukan analisis deskriptif data yang dipaparkan secara detil. Berbagai persoalan dihadapi madrasah antara lain pengelolaan pendidikan, kesenjangan antara negeri dan swasta, mutu madrasah, serta kurikulum. Tetapi madrasah memiliki kekuatan dengan situasi masyarakat yang mulai peka terhadap pendidikan Islam menjadi peluang dan tantangan tersendiri bagi madrasah.

Kata kunci: Madrasah, pendidikan, peran madrasah, sisdiknas.

ASPIRASI
Jurnal Studi Masalah-Masalah Sosial

Vol. 5 No. 1 Juni 2014

ISSN: 286-6305

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

A. M. Kartaatmaja

*Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP)
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*

**Menuju ASEAN Bebas Narkoba 2015:
Situasi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia**

**Jurnal ASPIRASI Vol. 5 No. 1 Juni 2014
halaman 59-69**

ABSTRACT

Illegal drugs cultivation, production, trafficking, and abuse are recognized as criminal acts. The number of drugs abusers in Indonesia is the highest among Southeast Asian countries. ASEAN leaders have declared to make the region a drug-free zone by 2015. This paper is conducted through literature study to examine the phenomenon of the spread of drugs in the ASEAN region. From the literature study it appears that the region is vulnerable to trans-national crime, including drug smuggling. The Indonesian people should be aware on transnational crimes as possible side effects of market liberalization. Family and local communities are the major foundation in fighting against drugs abuse. Illegal drugs distribution should be controlled by reducing both supply and demand.

Keywords: *Drugs abuse, rehabilitation, ASEAN, trans-national crime.*

ABSTRAK

Aktivitas penanaman, produksi, penyelundupan, dan penyalahgunaan narkoba ilegal dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. ASEAN menargetkan tahun 2015 untuk mencapai zona ASEAN bebas narkoba. Tulisan ini menggunakan metode studi kepustakaan, untuk menelaah fenomena penyebaran narkoba di wilayah ASEAN. Dari hasil studi literatur terlihat bahwa wilayah ASEAN memang rawan terhadap kejahatan trans-nasional, termasuk penyelundupan narkoba. Masyarakat Indonesia perlu mewaspadaai terjadinya peningkatan kejahatan trans-nasional sebagai efek samping dari kebebasan arus tersebut. Keluarga dan masyarakat merupakan fondasi utama dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Peredaran narkoba ilegal harus dikendalikan melalui pengurangan suplai dan permintaan.

Kata kunci: Penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi, ASEAN, kejahatan trans-nasional.

ASPIRASI
Jurnal Studi Masalah-Masalah Sosial

Vol. 5 No. 1 Juni 2014

ISSN: 286-6305

Kata Kunci yang dicantumkan adalah istilah abstrak. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa ijin dan biaya

Anih Sri Suryani

*Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI*

**Peran Bank Sampah dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah
(Studi Kasus Bank Sampah Malang)**

**Jurnal ASPIRASI Vol. 5 No. 1 Juni 2014
halaman 71-84**

ABSTRACT

Waste Bank is one of many alternatives of waste management in Indonesia. Malang Waste Bank (Bank Sampah Malang - BSM) is a sample of Waste Bank that has been well established and widely used as a pilot project. This research conducted with qualitative method to analyse the effectiveness of waste management in BSM from the waste management perspective. From institutional perspective, cooperative system is considered to be quite effective in making BSM independent and self-sufficient. There are still many obstacles experienced in terms of financing, while in terms of regulation, a regulatory support is necessary to strengthen the performance of BSM. To date, public participation play significant role, although it has not been at its best. This is because knowledge and understanding on waste bank are not evenly distributed. Operational technique aspect has been carried out effectively, although location is still a major problem.

Keywords: *Solid waste management, Malang Waste Bank, public participation.*

ABSTRAK

Bank Sampah merupakan salah satu alternatif pengelolaan sampah di Indonesia. Bank Sampah Malang (BSM) merupakan salah satu Bank Sampah yang telah berdiri dengan mapan dan banyak dijadikan percontohan. Penelitian kualitatif digunakan untuk melihat efektivitas pengelolaan sampah di BSM dari sudut pandang aspek pengelolaan sampah. Dari aspek kelembagaan, koperasi dinilai cukup efektif membuat BSM bisa mandiri dan berdikari. Hambatan masih banyak dialami dari segi pembiayaan, sedangkan dari segi regulasi masih diperlukan regulasi pendukung untuk memperkuat kinerja BSM. Selama ini, peran serta masyarakat sudah cukup baik, tetapi belum optimal. Hal ini dikarenakan pengetahuan dan pemahaman yang belum merata. Aspek teknik operasional sudah berjalan dengan efektif namun kendala tempat menjadi masalah utama.

Kata Kunci: Pengelolaan sampah, Bank Sampah Malang, peran serta masyarakat.